
LIBERALISASI PEMIKIRAN DALAM PENDIDIKAN

HASANUDIN ARINTA KUSRIN

Abstract

Hasanudin Arinta Kusrin
Universitas Ibn Khaldun

Email
pps@uika.ac.id

Liberalisasi (jasa) pendidikan akan terus melaju di Indonesia sesuai tuntutan pasar global dalam bidang pendidikan sebagai kegiatan industri jasa pendidikan. Kapitalisasi pendidikan di Indonesia akan terus berkembang dan membawa implikasi kepada pemikiran liberal dalam pendidikan yang akar sejarahnya sudah ada sejak kolonialisme Belanda. Liberalisasi ilmu pengetahuan sudah lama berlangsung di Indonesia dan kecenderungannya bahkan akan terus berlangsung dan membawa implikasi kepada berkembangnya gaya berpikir liberal sepanjang tidak muncul kesadaran dari insan-insan pendidikan untuk melakukan deliberalisasi. Liberalisasi berpikir atau pemikiran mengajarkan ilmu pengetahuan yang bebas nilai dan sekularisasi ilmu di Indonesia dengan konsep West Worldview dan Epistemologinya yang sudah lama berinteraksi ke dalam satuan pendidikan. Deliberalisasi konsep pendidikan wajib dilakukan, salah satu konsep yang sudah cukup lama dikenal dan belum optimal untuk diaktualisasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah melalui Islamisasi ilmu pengetahuan dengan penguatan pada tataran worldview dan epistemologi. Maka menjadi ironi bagi bangsa Indonesia yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia, tetapi kehadiran Islamic Worldview & Epistemologi Islam absen dalam kelas-kelas pendidikan yang masih terus berlangsung dan mungkin perlahan tapi pasti akan sirna atau berhenti sama sekali di rumahnya sendiri.

Keywords : *liberalisasi pemikiran, deliberalisasi islamisasi ilmu pengetahuan, islamic worldview, epistemologi islam*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, pendidikan tidak hanya berwajah liberal tapi juga kapitalistik, bahkan sejak era penjajahan, intervensi ke ranah pendidikan dilakukan pemerintahan Hindia Belanda dengan mendirikan dan menjalankan sekolah-sekolah Belanda yang liberal¹, sedangkan pesantren-pesantren sebagai suatu institusi pendidikan Islami di berbagai daerah pedalaman dan pelosok Indonesia sudah ada atau eksis berjalan dengan metode pendidikan dan pembelajarannya yang unik dan spesifik sebelum Belanda datang ke Indonesia. Kemudian Belanda berusaha untuk tidak membiarkan berkembangnya pendidikan Islam yang masih banyak diminati bangsa Indonesia pada waktu itu dengan cara merusak dan menyerangnya melalui intervensi terhadap kehidupan sosio-ekonomi umat Islam. Pusat-pusat bisnis atau perdagangan muslim yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah-daerah pesisir di Indonesia, diintervensi, dirusak dan dibekukan, diantaranya kegiatan niaga Sarekat Dagang Islam/SDI, yang kemudian menjadi Sarekat Islam dengan

harapan ekonomi umat Islam melemah maka akan mempengaruhi dan melemahkan pendidikan umat Islam. Inilah pikiran kapitalistik yang selalu memandang bahwa segala sesuatu harus didukung oleh kapital atau ekonomi mapan.

Upaya penghancuran sendi-sendi ekonomi masyarakat muslim telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencegah lajunya pendidikan berbasis Islam di Indonesia, menggunakan power politik untuk mengendalikan atau mengawasi institusi pendidikan melalui beberapa kebijakan atau aturan khusus bagi penyenggaraan pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah:²

1. Pada tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pendidikan dan pelaksanaan Islam di masyarakat. Dari laporan-laporan badan inilah sehingga pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran atau pengajian agama Islam, harus

¹ Lihat : Yudi Latief, *Inteleligensia Muslim dan Kuasa*, cet.1, Bandung: Mizan, 2005, h.107.

² Marjuni. *Kapitalisme dan Pendidikan Liberal*. Jurnal Al-Fikr, Volume 15, No.2 Tahun 2011.

terlebih dahulu melapor kepada pemerintah Belanda.

2. Pada tahun 1925, keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua Kiyai boleh memberikan pelajaran agama Islam, kecuali telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda.
3. Pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya adalah pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan Belanda.

Kapitalisme itu sendiri masuk ke Indonesia pada saat penjajahan Belanda, tidak lama setelah kaum liberal di negeri Belanda memperoleh kemenangan di parlemen, kemudian disusul dengan dilakukannya praktek-praktek liberalisasi (ekonomi) di Hindia Belanda (daerah jajahannya), terutama di Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa :

1. Penghapusan tanam paksa secara berangsur-angsur sejak tahun 1865 yang telah berlangsung mulai dari tahun 1830.

2. Diterimanya undang-undang agraria (hak atas tanah) pada tahun 1870 mengakibatkan:

- a) Para kapitalis Belanda diperbolehkan menanam modalnya di Indonesia dengan menyewa tanah-tanah yang belum pernah ditanami oleh orang-orang Indonesia selama 75 tahun. Dengan demikian tinggallah perkebunan-perkebunan besar yang dibuka oleh para kapitalis Belanda.
- b) Menjaga hak milik bangsa Indonesia, tanah Indonesia tidak boleh dijual kepada bangsa asing, dan hanya dapat dijual kepada bangsa Indonesia sendiri. Perubahan tanam paksa menjadi perusahaan perkebunan tanam paksa menjadi perkebunan perusahaan swasta, walaupun perubahan tersebut tidak membawa kepada perubahan nasib bangsa Indonesia, karena para kapitalis Belanda memaksa pekerja dengan upah yang serendah-rendahnya, yaitu 6 sen per hari³.

Selain itu, pemerintah Belanda juga menempuh usaha yang mematikan kegiatan-kegiatan umat Islam, seperti

³ Redja Mudyahardjo dalam Marjuni. Kapitalisme dan Pendidikan Liberal. Jurnal Al-Fikr, Volume 15, No.2 Tahun 2011.

mempelajari ikhwal pribumi dan agama Islam dengan ilmu khusus yang disebut “indologi untuk mencari celah kelemahan Islam. Untuk itu diutuslah *Cristian Snouck Hurgronje*, sarjana sastra untuk belajar tentang Islam di Leiden dan Strasbourg, kemudian melanjutkan studinya ke Mekkah selama enam bulan, dan namanya diganti *Abdul Gaffar*. Setelah kembali dari Mekkah, ia dikirim untuk membantu menyelesaikan pemberontakan Santri di Aceh. Melalui kesempatan ini Snouck Hurgronje menyampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda, agar mereka memperlihatkan sikap netral terhadap semua agama di Indonesia sambil menggunakan jalur pendidikan untuk mengatasi fanatisme Islam secara berevolusi, dan pemerintah Belanda diharapkan mewaspadaai masuknya *Pan Islamisme* yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain ke wilayah Indonesia, dan mengawasi kontak langsung dan tidak langsung antara tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh-tokoh luar (dunia Islam-pen.)⁴.

Namun sejak pertengahan abad 20-an, paska Indonesia merdeka, pendidikan mulai terbuka dan sistem pendidikan Barat diadopsi dan bahkan melanjutkan sistem pendidikan yang diwariskan penjajah Belanda, walaupun tidak secara total dilakukan dengan sistem hukum dan perundang-undangan masih banyak digunakan warisan kolonial Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah ikut mengalami pergeseran sistem sejalan dengan semakin gencarnya penetrasi modernisasi global. Modernisasi pendidikan agama berlangsung sedemikian intens dengan diterapkannya standarisasi sistem sekolah, pembakuan kurikulum, metode pembelajaran mengadopsi metode yang diterapkan oleh sekolah pemerintah yang masih dipengaruhi cara berpikir penjajah Belanda dengan konsep pendidikannya, penerbitan buku-buku teks dilakukan oleh kaum modernis sendiri. Modernisasi pendidikan agama telah membuka peluang terjadinya proses “sekularisasi ilmu” dalam pendidikan dimana salah satu indikatornya adalah mata-mata pelajaran umum (sekuler) yang semakin

⁴ Lihat : Samsul Nizar (ed), Sejarah Pendidikan Islam, cet I. Jakarta. Kencana

Prenada Media Group.2009.h.307-308 yang dikutip oleh Marjuni dalam Jurnal Al-Fikr....

banyak dan terus-menerus membengkak dalam komposisi kurikulum di lembaga pendidikan Islam⁵. Sistem Pendidikan Nasional pada waktu itu terbelah, ada jalur pendidikan umum plus agama masing-masing peserta didik (sekolah umum negeri) dan jalur penuh agama (madrasah) atau diniyah yang kemudian berkembang menjadi madrasah plus pelajaran non agama (umum). Perubahan sistem pendidikan Islam juga turut mengalami pergeseran seiring terjadinya perubahan sistem pendidikan dengan format modernisasi pendidikan yang liberal kapitalistik. Sistem pendidikan agama lewat surau dan pondok pesantren yang memperoleh dana dari zakat, infaq dan sedeqah yang diberikan oleh masyarakat/umat, kemudian dan kini berubah menjadi madrasah yang harus dibayar oleh keluarga siswa masing-masing dengan bayaran yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi keluarga setiap siswa. Perubahan mendasar lain yang juga terjadi adalah menyangkut kepemilikan lembaga pendidikan, jika sebelumnya pesantren atau surau itu adalah dimiliki pendiri dan anak cucu kiyai dan kerabat

keluarga secara turun temurun, banyak berubah dan ada yang menjadi madrasah yang dimiliki organisasi, yayasan atau pemerintah yang sudah ditentukan sistem menejemennya. Madrasah atau sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan yayasan sudah menjadi sistem pendidikan yang dikomersialisasikan, dimana setiap siswa yang masuk di sekolah tersebut harus membayar uang sekolah, kemudian dananya dikelola oleh pihak penyelenggara sekolah, sebahagian dari dana tersebut dimanfaatkan untuk pemeliharaan lembaga / sekolah / madrasah, dan sebahagian yang lain digunakan untuk upah pengelola dan para guru. Longgarnya persyaratan dan kesempatan untuk mendirikan yayasan oleh pemerintah, juga menyebabkan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang komersil, baik sekolah yang berhaluan umum, maupun madrasah dan pesantren modern, bahkan sampai kepada tingkat perguruan tinggi.

Kedadaan pendidikan di Indonesia tersebut sampai menjelang krisis moneter di Indonesia, masih di era Orde Baru, tepatnya sejak tahun 1995 diperparah lagi dengan masuknya Indonesia menjadi anggota WTO

⁵ Lihat: Marjuni, op.cit. Jurnal Al-Fikr.....

dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No. 7 tahun 1994, yang mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan *trade related intellectual property rights* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali “jasa non-komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya”. Seharusnya pendidikan masuk ke dalam jasa non komersial, tetapi sial bagi rakyat Indonesia, keputusan politik pemerintah telah menjadi fakta yang harus diterima dan membawa implikasi masuk ke dalam dunia pendidikan kapitalis yang liberalistis. Maka sejak itu Indonesia ternyata menjadi incaran negara-negara eksportir kapitalis jasa pendidikan dan pelatihan. Karena perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan masih rendah, secara umum mutu pendidikan nasional kita, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, jauh tertinggal dari standar mutu internasional, bahkan dari negara-negara ASEAN. Kedua alasan tersebut sering menjadi alasan untuk “mengundang” masuknya penyedia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke

Indonesia. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan. Keputusan tersebut dihadapkan dengan kondisi pendidikan nasional yang sampai saat ini masih buruk, dan ditetapkan di tengah angka buta huruf dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia pada saat itu, maka pendidikan hanya akan menjadi ladang komersial yang jauh dari upaya pemenuhan hak konstitusi rakyat atas pendidikan yang bermutu dan berkualitas oleh negara.

Menurut Dani Setiawan yang aktif dalam Program Officer Koalisi Anti Utang /KAU dan juga anggota dari Aliansi Advokasi Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kepentingan ekonomi negara-negara maju disinyalir berada di balik agenda liberalisasi jasa pendidikan. Paling tidak ada tiga Negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari bisnis pendidikan, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tidak mengherankan tiga negara tersebut yang amat getol menuntut sektor jasa pendidikan melalui WTO. Melihat data-data tersebut, menjadi mudah dimengerti bahwa perdagangan

jasa pendidikan sebenarnya digerakkan oleh motivasi mengejar keuntungan ekonomi semata oleh negara-negara maju. Aspek universal pendidikan sebagai bentuk pelayanan sosial dan proses penggalian kebenaran akan digantikan dengan hitungan untung rugi dalam logika bisnis. Di sisi lain, pendekatan hak atas pendidikan dapat dijadikan landasan penolakan terhadap liberalisasi pendidikan di Indonesia⁶.

Liberalisasi atau komersialisasi pendidikan di Indonesia terjadi tidak hanya berwajah kapitalis, tetapi berlangsung pula secara akademik dalam bentuk yang sangat primitif, yakni sebagai *proses menjadikan ilmu pengetahuan sebagai komoditi untuk mencari keuntungan* dan *proses transformasi pemikiran melalui ilmu pengetahuan*. Para pemilik modal melihat sekolah dan universitas sebagai tempat yang baik untuk mengembangkan investasi dan mengakumulasi kapital yang berorientasi laba dalam merebut pasar peserta didik atau pelajar/mahasiswa. Fenomena tersebut menunjukkan suatu gejala industrialisasi pendidikan atau liberalisasi

jasa pendidikan, sedangkan dari sisi transformasi nilai dan substansi ilmu pengetahuan yang diajarkan di kelas-kelas pendidikan di Indonesia sudah lama terkontaminasi atau didominasi oleh kerangka ilmu yang bebas nilai dan terjun bebas masuk ke dalam sistem nilai *West Worldview* dengan epistemologinya yang sekular liberalistik dan akarnya sudah ada sejak era kolonialisme Belanda.

B. Kajian Literatur

1. Liberalisasi Pemikiran dalam Pendidikan

Kata-kata liberal diambil dari bahasa Latin *liber* artinya bebas dan bukan budak atau suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Makna bebas kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berfikir (The old Liberalism). Dari makna kebebasan berfikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna⁷.

Secara politis liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak

⁶ Dani Setiawan (Program Officer Koalisi Anti Utang /KAU; Anggota Aliansi Advokasi Pendidikan Nasional). Artikel : Liberalisasi Pendidikan dan WTO dalam www.google.com.

⁷ Dr.Hamid Fahmy Zarkasyi. Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis). Artikel dalam www.google.com.

dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Dalam konteks sosial liberalisme diartikan sebagai adalah suatu etika sosial yang membela kebebasan (liberty) dan persamaan (equality) secara umum⁸. Menurut Alonzo L. Hamby, PhD, Profesor Sejarah di Universitas Ohio, liberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan kesempatan (opportunity)⁹.

Liberalisasi pendidikan di Indonesia sampai saat ini sudah terjadi, bukan karena tekanan globalisasi dan westernisasi ekonomi dengan WTO dan GAT programnya, namun juga masuk melalui tataran konsep ilmu yang membawa muatan-muatan pemikiran, ideologi dan aplikasi ilmu yang bebas nilai dalam kerangka konsep-konsep ilmu pengetahuan yang diajarkan secara

konseptual dan terorganisasi dalam satuan pendidikan di Indonesia. Di antara ciri liberalisasi ilmu pengetahuan adalah:

- a. Munculnya paham positivisme sekuler terhadap ilmu pengetahuan ilmiah, aktivitas teknologi, peradaban material, hukum, dan etika pragmatik individu.
- b. Ilmu pengetahuan ilmiah dibagi ke dalam disiplin yang spesialis, mendalam, teknis dan terpisah.
- c. Ilmu pengetahuan, positif mendeskreditkan atau mengeliminasi fungsi agama-agama dalam masyarakat ilmiah¹⁰.

Gelombang postmodernisme yang datang mengintervensi bagian-bagian belahan bumi termasuk ke Indonesia sangat terasa dalam berbagai bidang kehidupan yang dengan semangat menyebarkan paham pluralisme, menerapkan demokratisasi dan HAM serta gerakan neoliberalisme dengan liberalisasi di segala bidang kehidupan, diantaranya pendidikan. Francis Fukuyama dalam bukunya "The End of History and The Last Man, menyatakan:"Tidak diragukan lagi dunia

⁸ Coady, C. A. J. *Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, hl.440 dalam Hamid Fahmi Zarkasyi....op.cit

⁹ Brinkley, Alan. *Liberalism and Its Discontents*. Harvard Univ. Pr., 1998; Lihat juga Gray, John. *The Two Faces of Liberalism*. New Pr., 2000; Kloppenberg, James T. *The Virtues of Liberalism*. Oxford, 1998 dalam Hamid Fahmi Zarkasyi....op.cit

¹⁰ Azim Nanji, *Peta Studi Islam: orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di Barat*, (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h.351 –352 dalam Marjuni (2011).

Islam dalam jangka panjang akan nampak lebih lemah menghadapi ide-ide liberal ketimbang sebaliknya, sebab selama seabad setengah yang lalu liberalisme telah memukau banyak pengikut Islam yang kuat". Dan apa yang dinyatakan Fukuyama, tampaknya sudah terjadi di Indonesia. Di dunia pendidikan juga terbit isu-isu seksi tentang kurikulum berbasis kesetaraan gender, multikulturalisme dan pendidikan karakter berbasis pemikiran pluralisme dalam konsep-konsep Barat yang berbeda dengan konsep pendidikan Akhlak¹¹. Makna pendidikan sendiri ditelusuri secara semantik berasal dari akar kata *Education* (bahasa Inggris), berasal dari dua kata dalam bahasa latin, yaitu, pertama, *educere* yang berarti 'melatih' atau 'membawa keluar dari'. Kedua, *educare* yang berarti 'melatih' atau 'memelihara'.¹² Makna tersebut menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses mengubah manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kesadaran akan betapa mulianya pendidikan tampaknya

menyadarkan setiap insan yang peduli pendidikan bahwa siapapun, apalagi negara tidak dapat lepas tangan terhadap pendidikan yang akan membawa implikasi kepada kualitas manusia yang akan terbentuk dalam suatu komunitas mikro maupun makro dalam berinteraksi di masyarakat. Jika sistem pendidikan yang akan ditegakkan berdasarkan ideologi atau pemikiran sekularisme-kapitalisme atau sosialisme-komunisme itu berarti melalui pendidikan ingin mewujudkan struktur masyarakat sekuler-kapitalis atau sosialis-komunis, yang sejatinya lahir dari produk kebudayaan atau peradaban yang tidak Islami di Barat maupun di Timur. Kedua sistem pendidikan yang diusung sangat jelas akan bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang berbasiskan agama Islam untuk membangun struktur masyarakat yang Islami.

Konsep pendidikan Barat yang sejak Indonesia belum merdeka hingga saat ini terus berlangsung masuk melalui mekanisme kolonialisme Belanda sepanjang 350 tahun telah mengakar dan bahkan hingga paska kemerdekaan, ketika penjajah pergi, namun pemikirannya terus bertahan untuk mempengaruhi konsep berpikir orang-

¹¹ Menjawab Tantangan di Dunia Pendidikan. Artikel dalam Islamia, Volume IX, No.1, 2014 : Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam.

¹² Lihat : Christopher Winch and John Gingell, *Philosophy of Education: The Key Concepts*, Second Edition (New York: Routledge, 2008), 63.

orang Indonesia melalui jalur pendidikan. Paling tidak sudah lama terjadi konflik pemikiran dalam mengaplikasikan konsep pendidikan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saat ini kondisi pertentangan sudah dikemas sedemikian rupa untuk menggiring konsep pendidikan umat Islam semakin jauh dengan nilai-nilai epistemologi Islam. Perbedaan identitas dan kemudian gesekan antara satu peradaban dan worldview inilah yang menjadi tesis dan teori Samuel P Huntington sebagai “*clash of civilization*” (benturan peradaban). Menurut Hamid Fahmy Zarkasy¹³, perbedaan pada tingkat kehidupan sosial menyebabkan konflik, *clash* atau dalam bahasa Peter L Berger disebut *collision of consciousness* (tabrakan persepsi), sedangkan pada tingkat individu, akan mengakibatkan terjadinya pergolakan pemikiran dalam diri seseorang dan pada dataran konsep, mengakibatkan tumpang tindih dan kebingungan konseptual (conceptual confusion). Perang pemikiran pada tingkat individu inilah yang kini dirasakan ummat Islam Indonesia. Jadi

perang pemikiran dalam skala besar saat ini terjadi antara peradaban Islam dan kebudayaan Barat atau pandangan hidup (worldview) Islam dan Barat.

Worldview pendidikan Barat yang liberal, baik disadari maupun tidak disadari telah menjadi westernisasi gaya hidup maupun gaya berpikir orang Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan yang beraroma westernisasi ilmu yang memisahkan ilmu pengetahuan dan agama.

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ilmu-ilmu produk ilmuwan Barat menimbulkan persoalan pelik yang tidak menguntungkan bagi pandangan Muslim, dimana persoalan utamanya adalah pergeseran paradigma ilmu. Epistemologi yang digunakan dalam proses mendapatkan ilmu adalah epistemologi rasionalis-empiris-membuang dimensi metafisik¹⁴. Al-Attas juga menjelaskan dalam salah satu karyanya yang fenomenal, *Islam dan Sekularisme*, bahwa yang menjiwai budaya westernisasi ilmu pengetahuan adalah menjadikan dan mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan

¹³ Lihat : Dr.Hamid Fahmy Zarkasyi. Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis). Artikel dalam www.google.com.

¹⁴ Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam Kholili Hasib, MA. Konsep al-Attas tentang Adab (Tawaran Paradigma Pendidikan). Artikel dalam Islamia, Volume IX, No.1, 2014 : Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam.

manusia, menggunakan pendekatan dikotomis atau dualistik terhadap realita kebenaran, menegaskan aspek sekuler dalam humanisasi kehidupan, dan sebagai akibatnya menjadikan ilmu pengetahuan atau sains netral dan bebas nilai serta tidak bisa berpadu dengan nilai-nilai agama. Konsep nilai menjadi *banci dan kabur*, tidak tetap dan berubah-ubah, bahkan berstandar ganda terhadap kebenaran yang relatif sekalipun.

Bagi umat Islam paradigma sekuler itu dapat merusak pemikiran dan konsep-konsep pendidikan yang tidak memisahkan interrelasi dan interkoneksi antara Tuhan, Alam dan Manusia, sedangkan sekularisasi ilmu dan kehidupan menghendaki ketiga aspek itu tidak menjadi satu kesatuan yang abadi. Liberalisasi dan sekularisasi ilmu dalam paradigma worldview Barat adalah westernisasi ilmu yang melahirkan konsep dikotomi ilmu pengetahuan antara ilmu umum dan ilmu agama. Mata pelajaran umum tidak akan bertemu dengan mata pelajaran agama, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi liberalisasi pemikiran umat diarahkan dengan gaya berpikir yang melepaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan, dimana

pendidikan adalah pintu masuk sekularisasi ilmu yang wujudnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi umat Islam saat ini di era digitalisasi sains dan teknologi dan bahkan seterusnya sepanjang upaya-upaya untuk mendeliberalisasi pemikiran umat Islam tidak dilakukan melalui pendidikan di sekolah, perguruan tinggi maupun dalam keluarga-keluarga Muslim.

Tantangan ini harus dihadapi secara sinergis oleh umat Islam, dan salah satu yang paling fundamental menurut al-Attas adalah melakukan perubahan konsep-konsep ilmu kepada konsep ilmu yang islami sesuai dengan worldview Islam dan membangun epistemologi Islam atau dalam istilah yang populer adalah melakukan islamisasi ilmu pengetahuan.¹⁵

Wan Mohd Nor Wan Daud, salah satu muridnya al-Attas menyatakan bahwa di saat westernisasi dan kolonisasi dalam berbagai bentuknya masih berpengaruh dalam konteks globalisasi saat ini, upaya sejumlah ilmuwan Muslim untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan

¹⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud dalam Kholil Hasib, MA, ...op.cit.

kontemporer bukan hanya sekedar mempertahankan identitas agama dan budaya, tapi juga suatu alternatif yang lebih baik dibanding modernitas Barat yang terus menunjukkan defisit serius pada level global, terutama defisit *adab*. Wan Daud, mensitir banyak ilmuwan non Muslim dan pembuat kebijakan menyampaikan hujjah (atau pendapat-pen) perlunya melakukan usaha de-westernisasi, dekolonisasi, dan pribumisasi dari frame work ilmu pengetahuan, yakni De-westernisasi dan Islamisasi ilmu kontemporer dalam keterkaitannya dengan konsep universitas Islam dan *adab*¹⁶

Konseptualisasi intelektual formal dalam prose Islamisasi belum pernah dilakukan sampai abad ini. Kesadaran para ilmuwan Muslim bahwa sains Barat modern adalah ateis secara alami, dan karena itu perlu di Islamisasi atau di Islam kan pertama diungkapkan pada tahun 1930-an oleh Dr.Sir.Muhammad Iqbal yang tidak mendefinisikan gagasannya itu. Syed Hosen Nasr, pada tahun 1960 secara implisit menunjuk

metode Islamisasi sains modern yang menyarankan perlunya keharusan menafsirkan konsepsi Islam tentang Kosmos. Ismail R al-Faruqi kemudian mempopulerkan agenda Islamisasi ke seluruh dunia Islam.¹⁷

Tidak hanya kewarganegaraan, untuk berpindah atau mengganti identitas maupun entitas pribadi, ilmu pengetahuan juga bisa dinaturalisasikan sebagai upaya menghadapi liberalisasi ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Mulyadhi dalam Budi Hardrianto (Adian Husaini.et.al, 2013) mengatakan bahwa proses naturalisasi ilmu pengetahuan terjadi di mana saja, kapan saja sepanjang sejarah ilmu, misalnya ketika peradaban Mesopotamia menerima pelbagai corak budaya dan bahkan agama dari wilayah-wilayah sekitarnya, terjadi proses asimilasi dan akulturisasi yang kemudian menjadi corak khas budaya dan peradaban Mesopotamia yang khas. Begitu juga para filsuf Yunani yang mengolah informasi dari peradaban Mesir dan Suriah menjadi produk pemikiran Yunani yang khas rasionalistis. Filsuf Muslim abad 10, Abul Hasan al-Amiri banyak memberikan informasi bahwa

¹⁶ Wan Mohd Nor Wan Daud (2013:5). Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer dan peran Universitas Islam dalam konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi. Penerbit Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan UTM-CASIS (Universitas Teknologi Malaysia-Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization).

¹⁷ Wan Mohd Nor Wan Daud, op.cit. hal 32-33.

Phytagoras belajar geometri dan matematika dari orang-orang Mesir, sedangkan belajar metafisika dari sahabat-sahabat Nabi Sulaiman. Empedokles belajar filsafat dari Lukman al Hakim, seorang ahli hikmah di masa Nabi Daud, kemudian mengembangkannya dengan corak yang berbeda dan pemikirannya bertentangan dengan para gurugurunya, juga termasuk Plato dan Aristoteles. Begitu pula dengan ilmuwan-ilmuwan Muslim melakukan naturalisasi, menyerap dan mengadaptasi ilmu-ilmu dari Yunani. Selanjutnya ilmu-ilmu yang sudah di islamisasi dan atau dinaturalisasi oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim di abad pertengahan diambil, diserap dan dinaturalisasi oleh orang-orang Barat yang mengembangkan berpikir liberal dengan cara mengsekularisasi dan merasionalisasi ilmu pengetahuan yang bermula dari pemikiran filsuf Rene Descartes (m.1650). Dengan cara itu mereka membangun peradaban Barat sampai saat ini. Ilmu pengetahuan dengan corak dan epistemologi West Worldview.

Jadi naturalisasi bisa dilakukan dalam corak yang beragam dan sangat bergantung dengan worldview dari

ilmuwan yang akan mengemangkannya, bisa di bawa ke mana saja, sesuai dengan ideologi, budaya dan arah peradaban suatu komunitas dalam skala lokal maupun global. Produknya bisa Islamisasi, Westernisasi atau Sekularisasi atau Ateisasi yang semuanya itu berawal dari perubahan paradigma berpikir. Liberalisasi pemikiran dalam pendidikan yang di bawa oleh peradaban Barat dalam bentuk Westernisasi dan atau Sekularisasi ilmu pengetahuan harus dihadapi dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, dan ini harus dilakukan bukan hanya pada tingkat perguruan tinggi saja apalagi hanya perguruan tinggi atau universitas Islam, melainkan mulai dari tingkat pendidikan usia dini (PAUD) dan seterusnya. Upaya mendeliberalisasi pendidikan yang sudah tersekulerkan ini pada tingkat usia dini, usia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia hampir tidak kelihatan dilakukan baik dalam tataran konsep maupun aplikasi penerapannya. Padahal ini sangat penting karena upaya dewesternisasi dan desekularisasi bermula dari paradigma berpikir untuk melahirkan pemikiran yang islami sejak usia dini serta dilakukan melalui proses pendidikan yang sistematis dengan konsep pembelajaran yang holistik

terintegrasi antara aspek-aspek pendidikan Qolbu, Akal, Otak dan Otot dalam kerangka Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang shahih. Upaya deliberalisasi ini tidak akan tersentuh umat Islam melalui jalur pendidikan jika tidak didukung dan dipersiapkan secara konseptual dan upaya konkretisasi pada institusi-intitusi pendidikan yang dikelola umat Islam, alhamdulillah jika Negara menyadari bahwa ada hak umat Islam yang secara konstitusional harus diberikan perannya dalam membangun peradaban umat Islam melalui pendidikan yang sesuai dengan konsep ajaran Islam, maka pendidikan di Indonesia mungkin tidak seperti saat ini yang masih kuat terdikotomi, baik dalam tataran institusi maupun dalam aplikasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah.

Menurut AM Saefuddin (2010:8) mengutip Bastaman dalam Ulumul Qur'an, 1991 No8 Vol,2) terminologi islamisasi sains sendiri belum baku dan bahkan kontroversi karena belum ada kesepakatan diantara ilmuwan untuk memformulasikannya, namun paling tidak substansinya adalah bagaimana mengaitkan kembali sains dan agama

(Islam) yang berarti mengaitkan kembali hukum alam (sunnatullah) dengan Al-Qur'an, karena pada hakekatnya keduanya adalah ayat-ayat Allah (yang tidak mungkin dipisahkan atau terpisahkan-pen.).

Menangkal konsep liberalisasi pemikiran dalam pendidikan dikaitkan dengan proses islamisasi sains dapat dilakukan dalam tataran pola pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana diperkenalkan oleh Hanna Djumhana Bastaman dalam artikelnya yang berjudul *Islamisasi Sains dengan Psikologi sebagai Ilustrasi* (Saefuddin, 2010:8-9), dengan cara :

1. Similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama, padahal belum tentu sama.
2. Paralelisasi, yakni menganggap kesejalaran antara konsep yang berasal dari Al-Qur'an dengan konsep yang dari sains karena kemiripan konotasinya.
3. Komplementasi, yang menyatakan antara sains dan agama saling mengisi dan memperkuat satu sama lain tetapi masing-masing tetap mempertahankan eksistensinya sendiri.

4. Komparasi, yaitu membandingkan konsep dan teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala-gejala yang sama.;
5. Induktifikasi yang memiliki asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empiris dilanjutkan pemikirannya secara teoritis-abstrak ke arah pemikiran metafisik, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama (Al-Qur'an) mengenai hal tersebut.;
6. Verifikasi yang mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran Al-Qur'an.

C. Penutup

Upaya liberalisasi pra-kemerdekaan dalam pendidikan di Indonesia sudah ada sejak era kolonial Belanda dan itu dilakukan dengan cara pendekatan sosio kultural dan sosio political mengikuti perkembangan dan perubahan penguasa politik di Belanda, sedangkan institusi pesantren masih eksis dengan sistem pendidikannya yang islami.

Paska kemerdekaan di Indonesia, pendidikan semakin kental aroma konsep modernitas Barat yang

bersembunyi di balik tirai regulasi dan orientasi pendidikan yang dikemas dalam bahasa politik rezim yang berkuasa di era Orde Lama.

Di era Orde Baru, pendidikan semakin menunjukkan gejala terjadinya proses westernisasi baik ilmu pengetahuan maupun gaya hidup western dan sekular makin terasa pengaruhnya dalam alam pikiran bangsa Indonesia serta di dunia pendidikan, walaupun penghargaan terhadap budaya lokal asli dan tradisi pendidikan keagamaan masih dipertahankan di Indonesia dipelihara dan terpelihara untuk kepentingan politik penguasa. Pendidikan tersekularisasi sebagaimana gaya hidup dan kecenderungan terjadinya komersilisasi pendidikan yang mulai merebak baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ketika reformasi terjadi dan menemukan momentumnya paska reformasi, dunia pendidikan di Indonesia sudah berwajah kapitalis dan semakin liberal, gaya hidup hedonis yang mengusung pemikiran pluralisme semakin terlihat, masyarakatpun mengantisipasi, pro dan kontra terjadi, media semakin liberal dan membumi di Indonesia yang mempengaruhi opini dan budaya wacanasiasi dalam

pemikiran semakin kuat dengan berkembangnya sains dan teknologi di bidang informatika dan komunikasi.

Pendidikan cenderung diindustrialisasikan menjadi produk jasa mengundang pihak asing untuk menjadi pemain dalam kapitalisasi jasa pendidikan dan jualan ilmu pengetahuan. WTO dengan GATS dan tekanan politikpun atas nama ratifikasi Hukum, HAM dan Demokrasi serta kepentingan negara-negara besar kapitalis menjadikan Indonesia lahan yang menguntungkan bisnis dan politik mereka.

Kesadaran yang belum optimal dari ilmuwan, ulama dan para pemikir Bangsa yang peduli terhadap pendidikan yang terancam diliberalkan baik secara institusional maupun dalam proses pemikiran dalam memperoleh ilmu pengetahuan merupakan tantangan yang harus dihadapi komunitas besar dari Bangsa Indonesia yaitu umat Islam untuk segera meng-agendakan Islamisasi ilmu pengetahuan atau setidaknya melakukan naturalisasi ilmu pengetahuan bukan hanya di tingkat pendidikan tinggi saja tetapi juga yang sangat penting saat ini dan seterusnya adalah bagaimana mensosialisasikan dengan cara konkretisasi Islamisasi sains

pada tataran pendidikan dasar dan menengah sejak usia dini dalam PAUD dan seterusnya. Secara konseptual menjadi konsep Islamisasi pendidikan sejak usia dini pada pendidikan dasar dan menengah seharusnya sudah bisa dilakukan mengingat sudah banyaknya intitusi pendidikan Islami dijalankan oleh Umat Islam. Yang belum dilakukan konkretisasi pada tataran kurikulum pendidikan dan proses teknis pembelajaran yang memerlukan ahli-ahli pendidikan untuk urun rembuk memformulasi dan merumuskan dalam aplikasi yang praktis, ekonomis dan mudah dikelola, serta secara evolutif/bertahap sesuai usia perkembangan dan tantangan yang dihadapi peserta didik saat ini sekaligus untuk mengantisipasi perubahan pemikiran dan perkembangan sains dan teknologi di era digital yang serba instan, global dan liberal.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, Adian, et.al, 2013, *Filsafat Ilmu-Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saefuddin, AM, 2010, *Islamisasi Sains dan Kampus*, Jakarta: PT.PPA Consultants.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor, 2013, *Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer Dan Peran Universitas Islam dalam konteks Dewesternisasi dan Dekolonisasi*, Bogor: Penerbit Universitas Ibn Khaldun dan Universitas Teknologi Malaysia (UTM)-CASIS : Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization.
- Dani Setiawan (Program Officer Koalisi Anti Utang /KAU; Anggota Aliansi Advokasi Pendidikan Nasional). Artikel : Liberalisasi Pendidikan dan WTO dalam [www.google .com](http://www.google.com).
- Dr.Hamid Fahmy Zarkasyi. Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis). Artikel dalam [www.google .com](http://www.google.com).
- Kholili Hasib, MA. Konsep al-Attas tentang Adab (Tawaran Paradigma Pendidikan). Artikel dalam *Islamia*, Volume IX, No.1, 2014 : Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam.
- Marjuni. Kapitalisme dan Pendidikan Liberal dalam *Jurnal Al-Fikr*, Volume 15, No.2 Tahun 2011.

